



## Presiden Ungkap Ratusan Triliun Uang Negara Mengendap di Pemda

**JAKARTA, SP** - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menunjukkan kekesalannya di hadapan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia. Kekesalan tersebut lantaran banyak daerah mengendapkan uang negara hingga ratusan triliun rupiah di rekening Pemda.

• **Baca Halaman 7**



**RAKORNAS** – Pembukaan Rakornas Investasi 2020 yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2).

### Hal 1 | ■ presiden ungkap

Jokowi mengatakan hal itu saat membuka acara Rakornas Investasi 2020 yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kamis (20/2), di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Acara tersebut memang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia. “Karena di sini hadir Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ada yang mengkoliksi atau memungut pajak itu sangat sulit sekali pemerintah pusat, kemudian transfer ke daerah, baik dalam bentuk DAU maupun DAK,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah susah payah mengumpulkan penerimaan

negara seperti pajak. Uang itu kemudian disebar ke daerah dengan tujuan bisa meningkatkan perekonomian daerah. Namun, ternyata uang itu tidak dipergunakan dengan baik. Uang sudah dikirimkan hanya mengendap di rekening Pemda.

“Ini perlu saya peringatkan di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD itu disimpan masih pada angka Rp220 triliun. Sehingga tidak mempengaruhi ekonomi daerah,” tambahnya.

Angka uang Pemda yang mengendap di bank daerah itu turun jadi Rp110 triliun di Desember 2019. Namun tetap

saja Jokowi geram. Sebab uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian.

“Kalau itu bisa dihabiskan sebetulnya beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan yang ada di daerah itu,” tuturnya.

Dia ingin agar para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bersikap tegas. Jokowi tak ingin tahun ini ada pengendapan uang sebesar itu. Kemudian ia juga menyebutkan, Bupati dan Wali Kota, harus tegas, jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang hibah sebanyak ini jangan ulangi lagi di tahun 2020. (det/cnn/mul)